

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Sejak dahulu, telah terjadi dinamika pada pemerintahan Myanmar yang dibuktikan dengan terjadinya dua kali kudeta selama kurun waktu 76 tahun, salah satunya terjadi pada tahun 2021. Kudeta kali ini dapat dikatakan cukup darurat sebab telah berdampak sangat banyak terhadap Myanmar sendiri, dan mengancam bagi negara-negara tetangganya di kawasan Asia Tenggara. ASEAN sebagai satu-satunya organisasi kawasan Asia Tenggara, tentu saja memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong terjadinya penyelesaian terhadap isu kudeta militer di Myanmar. Dalam upaya penyelesaian permasalahan ini, ASEAN nyatanya mengalami hambatan, salah satunya perbedaan pandangan negara anggota ASEAN terhadap isu kudeta yang terjadi di Myanmar. Indonesia sebagai negara yang berpengaruh di kawasan Asia Tenggara, serta memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Myanmar sejak dahulu, berupaya untuk terlibat dalam penyelesaian isu kudeta militer Myanmar ini.

Dalam upayanya, Indonesia melakukan sekuritisasi terhadap negara-negara anggota ASEAN dalam merespon isu kudeta militer Myanmar. Hal tersebut bertujuan untuk menghilangkan perbedaan persepsi dan pandangan negara anggota ASEAN terhadap isu kudeta militer Myanmar sehingga akhirnya respon ASEAN terhadap isu tersebut menjadi satu suara atau mencapai konsensus. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa Indonesia melalui dua tahapan dalam upaya sekuritisasinya, yang terdiri dari tahap pemunculan isu dan meyakinkan *audience-*nya.

Dalam tahap pemunculan isu kudeta Myanmar sebagai ancaman bagi ASEAN, Indonesia merupakan salah satu negara yang merespon terjadinya isu kudeta militer Myanmar yang pada saat itu, belum menjadi perbincangan di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga dibantu oleh media massa dan aktor lain seperti PBB dan Duta Besar Amerika Serikat untuk membingkai isu kudeta sebagai isu yang mengancam bagi kawasan Asia Tenggara. Pada tahap meyakinkan ASEAN sebagai *audience*, Indonesia melalui Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan serangkaian upaya dan mengeluarkan berbagai pernyataan. Pernyataan tersebut disampaikan pada pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia, pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Menteri Luar Negeri Myanmar, serta upaya *shuttle diplomacy* yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia ke negara Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Pada tahapan ini, Indonesia berusaha mempolitisasi isu tersebut dengan diskusi dan mengeluarkan serangkaian pernyataan-pernyataan pada *audiences* atau lawan bicaranya.

Politisasi isu yang dilakukan Indonesia nyatanya berhasil membuat isu kudeta militer Myanmar di ASEAN menjadi isu prioritas dan membutuhkan tindakan darurat. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa Indonesia telah mencapai legitimasi isu dan mendapatkan keyakinan *audience* ketika Indonesia berhasil membuat ASEAN mencapai konsensus dan terbentuknya *act* atau tindakan bersama dari tahap politisasi sebelumnya. Hal tersebut dibuktikan dengan terselenggaranya ASEAN Leaders Meeting (ALM) yang menghadirkan seluruh perwakilan pemimpin negara termasuk negara Myanmar dan terbentuknya *five point consensus* yang merupakan hasil dari proses sekuritisasi yang dilakukan

oleh Indonesia. *Five point consensus* dapat dianggap hasil dan puncak sekuritisasi karena, terbentuknya *five point consensus* tersebut membuktikan bahwa telah terjalin kesepakatan di dalam ASEAN yang dengan kata lain, ASEAN telah mencapai konsensusnya.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, didapatkan jawaban dari bagaimana sekuritisasi yang dilakukan Indonesia terhadap penyelesaian isu kudeta militer Myanmar. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang penulis punya. Oleh sebab itu, penulis ingin memberikan saran pada penulis atau peneliti selanjutnya untuk mengangkat topik ini melalui sudut pandang yang berbeda. Pada penelitian ini, peneliti melihat sekuritisasi yang dilakukan Indonesia terhadap isu kudeta militer Myanmar. Untuk penelitian selanjutnya, penulis atau peneliti diharapkan dapat melihat mengenai isu kudeta militer Myanmar dari sudut pandang aktor luar seperti PBB, Amerika Serikat, maupun aktor lain yang dirasa terlibat dalam kasus ini. Tentu, dengan adanya perbedaan sudut pandang tersebut akan semakin memperkaya pemahaman terhadap isu kudeta militer Myanmar. Dengan perbedaan sudut pandang tersebut, penulis berharap hasilnya dapat memberikan masukan bagi pemerintah atau bahkan berisikan saran kebijakan. Sehingga penelitian selanjutnya tidak hanya bersifat deskriptif saja tapi dapat memberikan manfaat bagi para pengambil kebijakan terutama di kawasan Asia Tenggara.